

INOVASI *DIGITAL GOVERNMENT* DALAM PENGUATAN *GOOD GOVERNANCE* DI TINGKAT DESA (STUDI KASUS: KALURAHAN PLERET, KABUPATEN BANTUL)

Aulia Kharisma Putri^{1)*}, Ferri Wicaksono²⁾

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Amikom Yogyakarta
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
auliakharismaputri@students.amikom.ac.id

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Amikom Yogyakarta
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
wicaksono.ferri@amikom.ac.id

ABSTRAK

Era Society 5.0 mendorong pemerintahan untuk memperkuat tata kelola yang baik tingkat global dan nasional. Transformasi digital menunjukkan kemajuan, tetapi terdapat kendala. Tingkat desa, penyelenggaraan *digital government* sebagai instrument strategis untuk memperkuat *good governance*. Penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi *digital government* yang diimplementasikan di Kalurahan Pleret, Kabupaten Bantul serta keterhubungannya dengan prinsip-prinsip *good governance* menurut *Kajian United Nations Development Programme (UNDP)*. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif model studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi non-partisipatif, analisis dokumen, dan wawancara mendalam dengan aparat desa serta penerima layanan. Kemudian dianalisis menggunakan model analisis data kualitatif Creswell serta kerangka proses inovasi sektor publik dari *OECD*. Hasil menunjukkan inovasi *digital government* di Kalurahan Pleret meliputi portal layanan publik digital, sistem layanan surat daring berbasis WhatsApp, sistem informasi keuangan dan transparansi APBKal, sistem administrasi digital dengan tanda tangan elektronik, sistem diseminasi informasi publik berbasis media sosial, serta sistem arsip digital terintegrasi. Inovasi-inovasi yang ada berbasis pemetaan masalah lokal membentuk jejaring tata kelola yang saling terhubung dan berkontribusi terhadap penguatan prinsip partisipasi, transparansi, responsivitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, keadilan serta visi strategis pemerintahan desa. Temuan ini menunjukkan Kalurahan Pleret di Kabupaten Bantul sebagai salah satu contoh penerapan pemerintahan digital dalam penguatan tata kelola desa.

Kata Kunci: Inovasi Pemerintahan Digital, Tata Kelola yang Baik, Pemerintahan Desa

ABSTRACT

The era of Society 5.0 encourages governments to strengthen good governance at the global and national levels. Digital transformation shows progress, but there are obstacles. At the village level, digital government is implemented as a strategic instrument to strengthen good governance. This study aims to analyze digital government innovations implemented in Kalurahan Pleret, Bantul Regency, and their connection to the principles of good governance according to the United Nations Development Programme (UNDP) Study. Using a descriptive qualitative case study approach, data was collected through non-participatory observation, document analysis, and in-depth interviews with village officials and service recipients. The data was then analyzed using Creswell's qualitative data analysis model and the OECD's public sector innovation process framework. The results show that digital government innovations in Kalurahan Pleret include a digital public service portal, a WhatsApp-based online mail service system, a financial information and APBKal transparency system, a digital

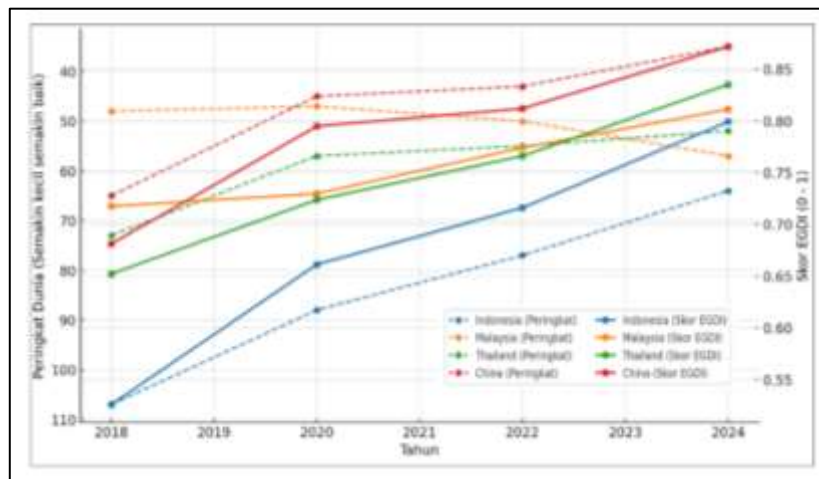


administration system with electronic signatures, a social media-based public information dissemination system, and an integrated digital archiving system. Existing innovations based on local problem mapping form an interconnected governance network that contributes to strengthening the principles of participation, transparency, responsiveness, accountability, effectiveness and efficiency, fairness, and the strategic vision of village administration. These findings show Kalurahan Pleret in Bantul Regency as an example of the application of digital governance in strengthening village administration.

Keywords: Digital Government Innovation, Good Governance, Village Administration

PENDAHULUAN

Lanskap pemerintahan kini menuju Era Society 5.0 di mana perkembangan teknologi yang pesat mendorong inovasi digital pada aspek tata kelola pemerintahan (Afrilia et al., 2024). Memicu munculnya konsep *digital government* sebagai bentuk pemanfaatan teknologi digital khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Secara global, banyak negara telah mengadopsi pendekatan *digital government* untuk mencapai layanan yang lebih efisien, transparan dan inklusif (Zou et al., 2023). Adanya pengembangan teknologi skala besar di lingkup pemerintahan menyebabkan inovasi digital yang memperkuat hubungan antara rakyat dengan pemerintahannya (United Nations, 2016). Perkembangan *digital government* di dunia menunjukkan tren positif ditunjukkan dengan banyak negara mengadopsi inovasi untuk meningkatkan pemerintahannya. Meskipun demikian Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dan kendala pada implementasi inovasi *digital government* guna penguatan *good governance*.



Gambar 1. Perkembangan Kualitas *Digital Government* Indonesia (2018-2024) dan Perbandingan dengan Malaysia, Thailand dan China (United Nations, 2024)

Gambar 1. Menunjukkan tren peningkatan *E-Government Development Index (EGDI)* Indonesia periode 2018-2024, serta perbandingannya dengan Malaysia, Thailand, dan China. Data menunjukkan Indonesia mengalami peningkatan skor EDGI secara konsisten dari 0,5258 (peringkat 107 dunia) pada tahun 2018 menjadi 0.7991 (peringkat 64 dunia) pada tahun 2024 (United Nations, 2024). Transformasi digital pemerintahan di Indonesia terus berkembang dan didukung oleh kebijakan serta infrastruktur digital nasional (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2020; Gusman, 2024) transformasi *digital government* Indonesia menunjukkan tren positif yang tercermin pada peningkatan signifikan dalam *EGDI*.

Fokus utama perbaikan kualitas layanan pemerintah, upaya penyederhanaan layanan, dorongan terhadap inovasi serta penguatan peran teknologi digital. Namun, kemajuan tersebut dihadapkan pada tantangan ganda: pertama, ketertinggalan dari Asia seperti Malaysia (57) dan Thailand (53); kedua, kendala struktural berupa fragmentasi sistem, disparitas infrastruktur digital, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Kendala dan tantangan ini dapat dijadikan kajian komprehensif dalam merumuskan strategi inovasi *digital government* yang berkelanjutan agar penguatan *good governance* di Indonesia dimulai dari lingkup desa. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, *digital government* dalam meningkatkan pelayanan publik menjadi fokus utama upaya modernisasi pemerintahan. Menurut penelitian oleh Almarabeh & Abuali (2010) *digital government* tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam penyampaian layanan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga. Dengan memanfaatkan platform digital, pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Mergel et al., 2021). Integrasi TIK dalam proses pelayanan menunjukkan *digital government* adalah pilar penting dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada masyarakat. Lebih lanjut penggunaan inovasi digital seperti *platform daring* dan data terbuka secara langsung memfasilitasi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan akses informasi yang mudah dan mekanisme umpan balik yang responsif (Guenduez et al., 2025).

Penerapan *digital government* selaras dengan prinsip-prinsip *good governance* dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana dijelaskan Erkut (2020) *good governance* mencakup praktik-praktik yang memastikan pemerintah bertindak secara adil dan efisien, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Menurut *United Nations Development Programme* Elahi (2009) *governance as good governance* mencakup implementasi tata kelola yang terdapat sembilan prinsip meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi kepada konsensus, berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas layanan publik. Bersamaan dengan implementasinya, inovasi digital membawa perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Integrasi perangkat digital tidak hanya menyederhanakan sistem pelayanan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* seperti legitimasi, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, responsivitas dan efektivitas (Keping, 2018). Seiring semakin banyak pemerintah di dunia yang menerapkan inovasi digital, membawa implikasi substansial terhadap reformasi struktur dan praktik *good governance*.

Memperkuat upaya penguatan *good governance* melalui inovasi *digital government*. Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pada tingkat desa terdapat Sistem Informasi Desa (SID) yang bertujuan untuk mempercepat transformasi digital di berbagai sektor (Wijaya & Saleh, 2025). Melalui program ini, pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan TIK dalam administrasi publik, sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas (Wibawa & Antarini, 2020). Penerapan *digital government* untuk penguatan *good governance* di Indonesia diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengembangan E-Government. Instruksi ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur teknologi yang memadai, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi antara instansi pemerintah untuk memastikan implementasi e-government yang sinergis.

Lingkup desa, penerapan *digital government* menjadi sangat penting karena meningkatkan aksesibilitas layanan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan local (Mayyora et al., 2025). Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah desa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat guna penguatan *good governance* yang lebih efektif dan inklusif. Oleh karena itu, penerapan *digital government* di tingkat desa tidak hanya berkontribusi pada peningkatan layanan publik, tetapi juga pada penguatan demokrasi lokal. Hingga tahun 2024, hanya sekitar 14.000 desa di Indonesia yang telah menerapkan program digitalisasi desa, sementara tantangan yang dihadapi hampir serupa di setiap desa (Transformasi Digitas: Mewujudkan E-Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat, 2025, 2025). Hal ini mencerminkan program digitalisasi desa yang merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk menjadikan 75.265 desa bertransformasi menjadi desa digital pada tahun 2025, belum sepenuhnya optimal (Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, 2024).

Implementasi sistem digital dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi krusial untuk meningkatkan kepercayaan publik. Regulasi terkait digitalisasi pemerintahan desa di Kabupaten Bantul diatur melalui beberapa peraturan, diantaranya Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur SPBE dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2023 yang berfokus pada pengembangan aplikasi SPBE. Peraturan ini bertujuan penguatan pemerintahan daerah berbasis elektronik yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperlancar tata kelola pemerintahan desa, menyediakan layanan lebih baik bagi masyarakat, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Kebijakan ini mendukung implementasi teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, sebagaimana ditekankan Lailiyah (2022) mengenai peran penting digitalisasi dalam pengembangan pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Diperkuat diterbitkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2024, memberikan peluang lebih besar bagi desa untuk mengimplementasikan konsep Desa Cerdas yang berfokus pada transformasi digital. Regulasi ini, secara jelas mengatur penggunaan Dana Desa untuk mendukung pengembangan infrastruktur TIK di tingkat desa. Kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendorong inovasi dan kesiapan desa menghadapi Era Society 5.0. Berlandaskan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan adanya peraturan yang lebih jelas mengenai penggunaan TIK, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa. Penerapan teknologi informasi diharapkan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa (Suprianto, 2023). Melalui pemanfaatan teknologi, pemerintah desa dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Inovasi *digital goverment* pada lingkup desa saat ini terdapat tantangan (Mao & Zhu, 2025). Masalah seperti kesenjangan digital, infrastruktur yang kurang memadai, SDM yang belum melek digital, dan resistensi terhadap perubahan dapat menghambat keberhasilan penerapan inisiatif digital. Kesenjangan digital hambatan terhadap akses yang adil ke layanan pemerintah, karena masyarakat yang terpinggirkan tidak memiliki teknologi atau keterampilan yang diperlukan untuk terlibat dengan platform digital. Selain itu, kurangnya infrastruktur yang memadai dapat menghambat akses dan pemanfaatan teknologi di tingkat desa serta belum terbangunnya *interoperabilitas* data dan layanan. Banyak desa yang masih terbelakang dalam hal konektivitas internet dan perangkat teknologi, sehingga menghambat penerapan sistem tata kelola digital yang efektif (Hajar & Arma, 2024).

Kalurahan Pleret Kecamatan Pleret, salah satu desa yang berupaya untuk memenuhi tuntutan hukum, dengan mengimplementasikan inovasi *digital government* sehingga mampu mendorong *good governance* di Indonesia (Zamroni & Junior, 2024). Keberhasilannya dalam menerapkan teknologi informasi pada tata kelola pemerintahan desa, dapat dijadikan contoh bagi desa lainnya sebagai studi inovasi *digital government* untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Kalurahan Pleret telah mengembangkan sejumlah aplikasi dan sistem digital mandiri yang mendukung pelayanan publik dan administrasi pemerintahan secara efisien (Restianti & Subaidi, 2024). Perkembangan pesat dan hasil positif di Kalurahan Pleret menjadikannya contoh model yang representatif untuk menelaah keberhasilan dan hambatan dalam tata kelola digital pemerintahan desa.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas inovasi *digital government* dan dampaknya pada *good governance* di tingkat desa. Secara umum penelitian-penelitian tersebut dikategorikan berdasarkan fokus yaitu: inovasi *digital government*, kontribusi inovasi terhadap peningkatan *good governance* dan tantangan dalam penerapan inovasi *digital government*. Beberapa studi mengenai inovasi *digital government*, seperti yang dilakukan oleh Ben & Schuppan (2014) dan Prayitno (2023) menyoroti peran *digital government* di Indonesia dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam administrasi publik. Aspek-aspek penting yang dibahas meliputi digitalisasi, peningkatan transparansi melalui media digital, otomatisasi proses, dan keamanan data. Jurnal ini mengidentifikasi tantangan seperti kesenjangan digital, resistensi terhadap perubahan, masalah hukum, dan partisipasi inklusif. Penting untuk memahami dan mengelola perubahan dalam kebiasaan kerja dan faktor organisasi saat memperkenalkan inovasi *e-government*.

Studi lainnya oleh Juiz et al (2014) dan Chhikara (2015) membahas mengenai kontribusi inovasi digital dalam peningkatan *good governance*. Keduanya membahas konsep dasar *good governance*, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan peran penting inovasi, teknologi, serta riset ilmiah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan. Menyoroti juga bagaimana tata kelola TI (Teknologi Informasi) di sektor publik dapat selaras dengan prinsip-prinsip *good governance*. Artinya inovasi *digital government* dalam hal ini tata kelola IT dapat diimplementasikan secara praktis untuk mencapai tujuan *good governance*. Beberapa penelitian lainnya menyoroti tantangan dalam penerapan inovasi *digital government*. Menurut Suwarjo (2025) *digital government* di tingkat desa memerlukan infrastruktur yang memadai. Terbatasnya akses internet dan infrastruktur teknologi informasi dapat menjadi kendala utama, terutama di daerah terpencil. Kurangnya keterampilan digital dan pemahaman tentang teknologi informasi di kalangan aparat desa dan masyarakat juga menjadi kendala serta masalah teknis seperti gangguan sistem, bug pada aplikasi, atau masalah keamanan data, ketidaktahuan pengguna juga menjadi tantangan dalam digitalisasi. Sedangkan Restianti & Subaidi (2024) lebih menekankan pentingnya pengawasan untuk penguatan pemerintahan yang baik dan bersih dalam implementasi inovasi *digital government*.

Perkembangan *digital government* dalam pelayanan publik telah banyak dikaji sebagai instrumen strategis dalam mendorong terwujudnya *good governance*, khususnya melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital berkontribusi terhadap perbaikan kinerja birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Djakit Prihartono, 2023; Dwi Maudina et al., 2024; Agung Gede Oka Wisnumurti et al., 2025; Sanur Kaja et al., 2024). Digitalisasi pelayanan publik dipahami sebagai bagian dari reformasi administrasi publik yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi sistem, tetapi juga peningkatan kualitas layanan.

Penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada aspek normatif dan struktural, sementara kajian mengenai implementasi konkret inovasi digital serta pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan di tingkat pemerintahan desa masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji implementasi inovasi digital government dalam pelayanan publik di Kalurahan Pleret, Kabupaten Bantul, dengan menitikberatkan pada praktik pelaksanaan, pengalaman pengguna layanan, dan implikasinya terhadap penguatan prinsip *good governance*.

Penelitian terkini mengenai digitalisasi tata kelola desa di Kalurahan Pleret, seperti kajian Zamroni & Junior (2024) tentang reformasi birokrasi di Pleret dan Suwarjo (2025) tentang implementasi smart village, secara dominan terfokus pada modernisasi administrasi dan efisiensi layanan berbasis teknologi. Kedua studi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman transformasi digital, tetapi belum mengeksplorasi secara mendalam korelasi kausal antara inovasi digital dengan pencapaian indikator *good governance* khususnya dalam dimensi partisipasi warga, akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi substantif. Meskipun banyak penelitian yang membahas inovasi *digital government* dan pentingnya *good governance*, masih terdapat beberapa celah penelitian yang perlu dikaji. Belum ada pembahasan spesifik mengenai bagaimana proses inovasi *digital government* memanfaatkan sistem informasi yang digunakan di Kalurahan Pleret dalam penguatan *good governance*. Konstruksi interoperabilitas dalam sistem informasi desa merupakan hal penting agar data dari Kalurahan Pleret dapat digunakan oleh banyak pihak secara lebih luas. Hal ini mendukung kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak lain yang terlibat dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan.

Dalam penerapan inovasi *digital government* pada lingkup desa memiliki berbagai tantangan signifikan yang dialami. Pemerintahan Kalurahan Pleret telah berhasil mengatasi berbagai tantangan dalam penerapan inovasi digital melalui serangkaian strategi yang efektif. Dengan demikian, Kalurahan Pleret bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Bantul bahkan lingkup nasional dalam menerapkan sistem inovasi digital yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana inovasi *digital government* berkontribusi dalam penguatan *good governance* di Kalurahan Pleret, yang dapat menjadi model bagi desa-desa lain. *Good governance*, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas, merupakan prinsip penting untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Penelitian ini mengadopsi konsep *digital government* dan *good governance*, serta menggunakan rekomendasi *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* sebagai kerangka acuan. Teori inovasi sektor publik dikembangkan oleh *OECD* melalui lembaga risetnya *Observatory of Publik Sector Innovation (OPSI)*, pertama kali dikodifikasi dalam laporan *The Innovation System of the Publik Sector* (Ahrend & al., 2014; OECD, 2020). Model ini dikenal dengan nama *Publik Sector Innovation Lifecycle*, yaitu kerangka berpikir yang menekankan inovasi dalam pemerintahan harus dilihat sebagai suatu proses yang sistemik, dan berkelanjutan. Inovasi digital di Kalurahan Pleret berfungsi untuk menyederhanakan pelayanan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas dan responsivitas pemerintahan. Teori inovasi sektor publik menjadi landasan konseptual yang penting, di mana inovasi dimaknai sebagai pengembangan gagasan dan mekanisme baru dalam administrasi publik untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan (Sørensen & Torfing, 2017). Melalui teori ini, peneliti tidak hanya melihat hasil akhir dari inovasi, tetapi juga mampu memahami keseluruhan proses *transformasi digital* secara mendalam.

Dengan demikian, digitalisasi dalam pemerintahan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan tata kelola yang lebih baik dan berkelanjutan. Penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi bagaimana Kalurahan Pleret berhasil mengatasi tantangan tersebut dan bagaimana bentuk inovasi digital di Kalurahan Pleret serta kontribusinya dalam penguatan *good governance*. Dengan memahami proses dan hasil dari penerapan *digital government* di Kalurahan Pleret, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi desa-desa lain yang sedang berupaya untuk bertransformasi ke arah digitalisasi sebagai upaya dalam penguatan *good governance*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi penerapan inovasi *digital government* dalam penguatan *good governance* di Kalurahan Pleret. Metode ini dipilih karena memberikan wawasan tentang fenomena yang diteliti dan mengungkap informasi yang belum terpenuhi secara spesifik dan mendalam (Rijal Fadli, 2021). Selain itu, metode deskriptif kualitatif berguna dalam situasi yang membutuhkan *fleksibilitas* dan *responsivitas* saat menghadapi masalah sosial yang kompleks dan terus berkembang. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti menyajikan gambaran masalah sosial sesuai dengan situasi lapangan secara langsung. Proses ini mencakup pengumpulan data lapangan, pengorganisasian data, dan penyusunan laporan naratif. Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus memungkinkan pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang dari sudut pandang informan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat inovasi digital. Oleh karena itu, peneliti dapat mengetahui proses inovasi berkontribusi dalam penguatan tata kelola pemerintah desa, serta memberikan rekomendasi praktis bagi desa lain yang ingin menerapkan inovasi serupa untuk penguatan *good governance* di tingkat desa.

Penelitian berlokasi di Kalurahan Pleret, Kabupaten Bantul, DIY, yang dikenal sebagai Kalurahan Digital. Untuk menggali perspektif komprehensif tentang implementasi *digital government*, pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* dengan melibatkan informan dari aparat desa dan masyarakat pengguna layanan. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumen, dan analisis konten media digital. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode (Creswell & Poth, 2022). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model spiral melalui tahapan: pengorganisasian data (*organizing*), penelaahan (*reading*), pemberian kode (*coding*), pengelompokan tematik (*categorizing*), dan penafsiran makna (*interpreting*). Proses ini memungkinkan identifikasi pola signifikan implementasi *digital government* sekaligus evaluasi kontribusinya terhadap prinsip *good governance* (transparansi, partisipasi, akuntabilitas) ((Ahrend & al., 2014); (Elahi, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kalurahan Pleret

Kalurahan Pleret terletak di Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan luas wilayah 425, 1570 Ha dan kepadatan penduduk 8.163 jiwa/km² 10. Secara geografis, wilayah ini berbatasan dengan Kalurahan Wirokerten dan Kalurahan Jambidan di utara, Kalurahan Segoroyoso dan Kalurahan Bawuran di timur, Kalurahan Wonokromo di barat, dan Kalurahan Segoroyoso di selatan. Struktur administratifnya terbagi menjadi 11 Padukuhan dan 79 RT, dengan kepemimpinan saat ini dipegang oleh Taufiq Kamal S.Kom., M.Cs. (periode 2021-2027) yang didukung aparatur desa (Carik, Kamituwa, Jagabaya, dan 11 dukuh).

Tabel 1. Sumber Daya Manusia di Kalurahan Pleret Tahun 2024

No	Kriteria Penduduk	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga	Jumlah Penduduk	14.348	Orang
		Jumlah Penduduk Laki-Laki	7.262	Orang
		Jumlah Penduduk Perempuan	7.086	Orang
		Jumlah Kepala Keluarga	4.678	KK
2.	Jumlah Penduduk Menurut Usia	Anak-anak (12 – 17 tahun)	1.452	Orang
		Dewasa (18 – 49 tahun)	7.033	Orang
		Tua (50 – 59 tahun)	1.889	Orang
		Tua Sekali (60 – 120 tahun)	1.980	Orang
3.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	Sarjana (S1-S3)	976	Orang
		Akademis (D1-D3)	313	Orang
		SMA/Sederajat	3.894	Orang
		SMP/ Sederajat	2.098	Orang
		Tamat SD/Sederajat	2.559	Orang
		Belum Tamat SD/Sederajat	1.338	Orang
		Tidak/Belum Sekolah	3.070	Orang

Sumber: (Kalurahan Pleret, 2024)

Berdasarkan Tabel 1. Data demografis Kalurahan Pleret dapat mendorong sekaligus menghambat inovasi *digital government*. Dari 14.348 penduduk, struktur usia menunjukkan 26,9% penduduk berusia lebih dari 50 tahun (1.889 usia 50-59 tahun + 1.980 lansia ≥ 60 tahun), kelompok yang rentan terhadap digital divide akibat keterbatasan literasi teknologi. Sisi lain, 59,1% penduduk berusia 12-49 tahun (1.452 remaja + 7.033 dewasa) menjadi potensi adopsi layanan digital. Kecenderungan perbedaan ini terlihat jelas dalam tingkat pendidikan: lulusan SMU/SMK mendominasi sekitar 3.894 jiwa atau 27,13% sedangkan lulusan diploma dan sarjana sekitar 1.289 jiwa atau 8,98% dan 30,7% lainnya (4.408 orang) hanya tamat SD atau tidak bersekolah, menciptakan hambatan kognitif dalam pemanfaatan aplikasi *e-government*. Implikasi terhadap prinsip *good governance* bersifat saling bertentangan. Transparansi melalui portal anggaran digital efektif untuk penduduk berpendidikan diatas SMU/SMK yang mampu memahami visualisasi data, tetapi tidak terjangkau oleh 30,7% kelompok berpendidikan rendah yang membutuhkan pendekatan analog. Partisipasi dalam e-musrenbang didominasi usia produktif (18-49 tahun), namun terhambat pada 26,9% lansia dan 26,6% buruh harian lepas (3.251 orang) yang terkendala waktu dan akses. Akuntabilitas layanan seperti respon pengaduan kurang dari 24 jam dipacu tekanan 49% penduduk dewasa (7.033 orang), tetapi terancam oleh keterbatasan SDM terampil (hanya 9% berpendidikan tinggi) dalam mengelola sistem.

B. Strategi dan Tahapan Inovasi Digital

Secara potensial, inovasi digital Kalurahan Pleret diperkuat oleh komitmen kepemimpinan yang tinggi dari Lurah Pleret, Taufiq Kamal S.Kom., M.Cs sejak menjabat pada tahun 2020. Komitmen ini tercermin dalam visi "Pleret Mandiri, Sejahtera, Religius, dan Digital" yang kemudian diwujudkan melalui pengembangan layanan digital terintegrasi meliputi portal resmi pleret.id sebagai *single gateway* informasi, aplikasi OpenSID untuk otomatisasi administrasi kependudukan, serta integrasi media sosial (Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube) Kalurahan Pleret yang menjangkau 78% populasi usia dominan produktif secara demografis di Kalurahan Pleret produktif (18-35 tahun). Sesuai dengan misi Kalurahan Pleret dalam RPJMKal Tahun 2021-2026 tentang penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Pleret yang bersih, transparan dan profesional guna penguatan *good governance*. Kemudian menjadikan Desa Digital sebagai upaya dalam pemberdayaan warga Kalurahan Pleret melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran, percepatan akses serta pelayanan informasi

Gagasan Desa Digital Kalurahan Pleret menjadi fondasi penting dalam menjamin mutu layanan, kejelasan proses bagi pengguna layanan. Efisiensi dan aksesibilitas layanan publik pun meningkat secara signifikan karena masyarakat tidak lagi harus hadir secara fisik untuk mengurus dokumen administratif. Melalui *prototype website* <https://pleret.id/> berbasis data terpadu, membentuk *model governance interoperability* antara masyarakat, sistem desa, dan kabupaten. Strategi inovasi digital bukan hanya respon terhadap tantangan *administrative*, tetapi perwujudan dari visi kepemimpinan yang berorientasi pada transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Setiap tahap dalam proses inovasi menunjukkan dinamika dan pendekatan yang berbeda, mulai dari indentifikasi permasalahan struktural dalam pelayanan publik, hingga *difusi* nilai-nilai inovatif melalui proses hingga realisasinya. Penjelasan mengenai gambaran masing-masing tahap bagaimana inovasi *digital government* dibentuk, dijalankan dan dinilai efektivitasnya di Kalurahan Pleret. Proses inovasi di Kalurahan Pleret didukung oleh faktor kepemimpinan visioner, regulasi pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat.



Gambar 2. Public Sector Innovation Lifecycle OECD, Laporan The Innovation System of the Publik Sector (2020) (Ahrend et al., 2014)



Berdasarkan gambar 2 Implementasi inovasi *digital government* di Kalurahan Pleret dapat dianalisis berdasarkan lima tahapan proses inovasi sektor publik menurut. Dimulai dari pengenalan masalah layanan manual yang kurang efisien (*identifying problems*), muncul ide digitalisasi melalui diskusi warga dan perangkat desa (*generating ideas*), lalu disusun proposal inovasi seperti pembuatan *website* dan aplikasi layanan (*developing proposals*). Setelah itu, sistem digital digunakan (*implementing projects*), kemudian hasilnya dievaluasi dari segi efektivitas, efisiensi, dan respons masyarakat (*evaluating projects*). Jika inovasi ini berhasil, maka praktik baik tersebut bisa direplikasi atau dibagikan ke desa-desa lain (*diffusing lessons*).

1. Identifikasi Masalah (*identifying problems*)

Tahap identifikasi permasalahan merupakan langkah inisial dalam proses inovasi sektor publik, di mana institusi pemerintahan lokal melakukan deteksi terhadap berbagai kendala mendasar dalam sistem pelayanan masyarakat dan pengelolaan tata pemerintahan internal. Tantangan tersebut tercermin dalam hasil wawancara lapangan, aparat desa menyampaikan bahwa “keterbatasan data menyebabkan pengelolaan data tidak terdeteksi secara akurat, kondisi ini menyulitkan pemerintah desa dalam merumuskan dan melaksanakan program serta inovasi yang tepat sasaran terhadap kebutuhan masyarakat”. Temuan wawancara menunjukkan sebelum diterapkannya sistem digital, proses validasi dokumen kependudukan sering mengalami keterlambatan karena data warga belum terhubung secara terpadu, sementara akses masyarakat terhadap informasi anggaran masih terbatas. Keterbatasan tersebut dipandang menghambat transparansi dan pengawasan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kondisi tersebut mendorong kepemimpinan desa untuk merumuskan digitalisasi sebagai pendekatan strategis utama dalam tata kelola pemerintahan. Hambatan struktural yang ditemukan antara lain ketergantungan pada interaksi tatap muka, terbatasnya akses publik terhadap informasi pemerintahan, serta problematika pengelolaan arsip dokumen dan mekanisme presensi aparat. Hasil identifikasi ini menjadi fondasi dalam merumuskan strategi digitalisasi sebagai intervensi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik.

2. Penciptaan Ide (*generating ideas*)

Setelah teridentifikasi permasalahan yang ada, tahapan selanjutnya adalah pembentukan gagasan yang bersifat inovatif dan kontekstual. Kalurahan Pleret mengembangkan digitalisasi menjadi beberapa gagasan strategis, meliputi pengembangan sistem pelayanan administrasi berbasis platform digital, pengintegrasian sistem basis data, serta pemanfaatan media sosial dan aplikasi komunikasi sebagai kanal interaksi dinamis antara pemerintah dan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan digitalisasi dipandang sebagai solusi nyata untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas. Implementasi dari gagasan inovasi tersebut adalah pembentukan portal desa terintegrasi yang menyediakan beragam layanan administratif dan menyajikan informasi keuangan desa secara aktual. Kepemimpinan desa mempresentasikan konsep inovasi ini dalam berbagai forum, baik internal maupun eksternal, sebagai upaya diseminasi dengan penekanan pada efisiensi operasional, peningkatan aksesibilitas, dan penguatan transparansi pelayanan publik. Gagasan-gagasan utama yang dirumuskan mencakup: sistem layanan mandiri berbasis situs web, pendayagunaan aplikasi pesan instan untuk notifikasi dan mekanisme pengaduan, pembangunan perpustakaan digital, konstruksi sistem pengarsipan berbasis digital, serta implementasi teknologi digital dalam sistem presensi kepegawaian.

3. Pembuatan Proposal (*Developing Proposal*)

Tahap penyusunan proposal merujuk pada proses elaborasi rencana kegiatan yang sistematis guna mentransformasikan konsep digitalisasi menjadi program operasional. Kalurahan Pleret mengembangkan aktivitas digitalisasi mencakup pengajuan pendanaan, kerangka kerja perencanaan, dan dukungan pemerintah kabupaten menjadi komponen integral dalam memberikan legitimasi teknis terhadap program inovasi. Proses ini mencakup: pengintegrasian perencanaan transformasi digital ke dalam dokumen kerja strategis seperti RKPKal dan RPJMKal; perumusan usulan pendanaan dan kemitraan melalui skema CSR, hibah, serta penyusunan spesifikasi teknis sistem layanan digital, identifikasi kebutuhan teknis, dan proyeksi anggaran pembiayaan.

Proposal yang tersusun berfungsi sebagai landasan implementasi berbagai inovasi digital yang dikembangkan di Kalurahan Pleret, mencakup: (1) pengembangan portal elektronik layanan mandiri (pleret.id) dengan lebih dari 40 jenis layanan administrasi; (2) implementasi sistem tanda tangan digital menggunakan sertifikat BSRE dan aplikasi Be-Sign; (3) integrasi basis data kependudukan dengan Dukcapil melalui API; (4) sistem monitoring penanganan COVID-19; (5) digitalisasi administrasi umum dan buku agenda persuratan dengan notifikasi WhatsApp Gateway; (6) sistem pemetaan wilayah berbasis GIS; (7) sistem pencatatan aset dan inventaris; (8) pengembangan BUMDes Lumbung Pangan Mataram dengan platform pasar online (pasar.pleret.id); (9) perpustakaan digital (perpustakaan.pleret.id); (10) sistem presensi berbasis face recognition; (11) pengembangan infrastruktur internet gratis di setiap padukuhan; (12) sistem QR Code rumah tangga; serta (13) pengembangan destinasi wisata berbasis teknologi informasi. Penyusunan proposal melibatkan mekanisme verifikasi dan persetujuan melalui prosedur Musrenbang, sehingga inisiatif digitalisasi memperoleh legitimasi administratif dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan yang relevan, termasuk Dinas Kebudayaan, BPKP Provinsi, dan instansi terkait lainnya.

4. Pelaksanaan Program (*Implementing Projects*)

Implementasi inovasi pemerintahan digital di Kalurahan Pleret melibatkan serangkaian aktivitas operasional. Penerapan sistem administrasi berbasis teknologi digital memungkinkan masyarakat mengajukan 47 jenis layanan kemasyarakatan melalui portal pleret.id atau WhatsApp Gateway secara daring tanpa interaksi tatap muka, mencakup layanan keterangan penduduk, administrasi pernikahan, akta kelahiran, perubahan kartu keluarga, hingga pertanahan. Sistem layanan mandiri menggunakan mekanisme autentikasi PIN yang diperoleh melalui WhatsApp. Sistem pemantauan kinerja aparatur menggunakan presensi face recognition untuk WFO dan absensi WhatsApp untuk WFH, yang berkontribusi pada akuntabilitas internal dan penetapan tunjangan kinerja.



Gambar 3. Tampilan Layanan Mandiri WhatsApp Gateway (Katalog Inovasi Pemerintahan Kalurahan Pleret)



Gambar 4. Tampilan Portal Layanan Terpadu pleret.id (Website pleret.id)

Platform digital terintegrasi yang diluncurkan meliputi: sistem administrasi kependudukan terintegrasi Dukcapil melalui API; tanda tangan digital bersertifikat BSRE yang sah secara hukum; sistem monitoring COVID-19 dengan data suspect dan vaksinasi; digitalisasi 15 jenis buku administrasi umum dengan notifikasi WhatsApp otomatis; sistem pemetaan GIS untuk wilayah, bencana, dan fasilitas umum; sistem pencatatan aset digital; platform pasar online BUMDes (pasar.pleret.id) untuk produk unggulan dan penyaluran BLT Dana Desa. Implementasi bidang kewilayahan mencakup: pengembangan 6 destinasi wisata alam dengan Pokdarwis; pembentukan Satgas COVID-19 di 11 padukuhan; integrasi CCTV kewilayahan (cctv.pleret.id); pembentukan SAR wisata dengan pelatihan water rescue; alat deteksi dini bencana banjir; penyediaan internet gratis di 14 titik setiap padukuhan; QR Code rumah tangga untuk pendataan. Tahap implementasi Kalurahan Pleret merupakan upaya transformasi operasional menuju *digital government* yang mencakup pelayanan publik, manajemen SDM, dan layanan data responsif dengan standar pelayanan terpadu.

5. Evaluasi Program atau Inovasi (*Evaluate Projects*)

Evaluasi inovasi diimplementasikan secara berkelanjutan untuk memastikan program berjalan selaras dengan tujuan strategis. Indikator evaluasi yang diterapkan di Kalurahan Pleret meliputi beberapa dimensi pengukuran: pertama, pengukuran kinerja sistem layanan digital yang mengukur efisiensi temporal dalam proses pelayanan administratif; kedua, capaian kompetisi desa dan rekognisi eksternal yang dibuktikan melalui prestasi pada tahun 2022 yaitu meraih Juara I Lomba Desa/Kalurahan tingkat Kabupaten Bantul, Juara I tingkat Provinsi DIY, Juara III tingkat Nasional Regional II, serta Juara III dalam Pekan Inovasi Desa/Kelurahan (Pindeskel) Kementerian Dalam Negeri, yang menandakan validasi eksternal terhadap penerapan inovasi; ketiga, evaluasi berbasis analisis data statistik melalui program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik yang difasilitasi BPS untuk memperkuat praktik tata kelola berbasis evidensi. Proses evaluasi dilaksanakan secara periodik melalui pengukuran efektivitas sistem pelayanan, efisiensi durasi pemrosesan, dan tingkat kepuasan masyarakat. Mekanisme evaluasi juga dioperasionalkan melalui umpan balik masyarakat via kanal komunikasi digital. Hasil evaluasi mengindikasikan peningkatan performa pelayanan publik, percepatan proses penerbitan dokumen administratif, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik.

6. Penyebarluasan hasil inovasi (*Diffuse Leassons*)

Tahap penyebarluasan hasil inovasi di Kalurahan Pleret dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, melalui Program Studi Desa sebagai rujukan pembelajaran bagi desa lain serta menghadirkan pelatihan berbayar yang memungkinkan transfer pengalaman dan praktik tata kelola pemerintahan lokal, sekaligus mendukung keberlanjutan pendanaan digitalisasi. Kedua, pelaksanaan sosialisasi internal dan eksternal melalui forum diskusi, pertemuan koordinasi, dan publikasi yang melibatkan aparatur desa, pelaku UMKM, serta masyarakat umum mengenai signifikansi teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan desa. Ketiga, dokumentasi publik melalui portal elektronik desa yang mempublikasikan laporan inovasi, sistem layanan digital, serta strategi tata kelola pemerintahan secara terbuka untuk dapat diakses dan direplikasi oleh pihak manapun yang berkepentingan.

C. Inovasi *Digital Government* di Kalurahan Pleret dan Kontribusi Serta Keterkaitan Terhadap Penguatan Prinsip *Good Governance*

Inovasi digital yang dirancang secara inklusif dan berbasis data tidak hanya berfungsi sebagai instrument teknis pelayanan publik, tetapi berkontribusi terhadap penguatan *good governance* desa secara substantif. Temuan menunjukkan inovasi *digital government* di Kalurahan Pleret dikembangkan secara bertahap dan terintegrasi dalam beberapa aspek penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tabel 2 Kontribusi Inovasi Digital Terhadap Prinsip *Good Governance*

Inovasi Digital	Prinsip <i>Good Governance</i>	Bentuk Kontribusi
Portal Layanan Publik Digital/ Layanan Mandiri Kalurahan Pleret (pleret.id)	Partisipasi, Transparansi, Responsivitas, Akuntabilitas, Efektivitas & Efisiensi, Keadilan dan Visi Strategis	Publikasi APBKal & regulasi, kanal pengaduan daring, integrasi layanan satu pintu, promosi UMKM.
Sistem Layanan Informasi dan Surat Daring Berbasis WhatsApp Gateway	Partisipasi, Responsivitas, Efektivitas & Efisiensi, dan Keadilan	Layanan surat daring cepat, notifikasi digital terverifikasi, efisiensi pelayanan secara online.

Inovasi Digital	Prinsip <i>Good Governance</i>	Bentuk Kontribusi
Sistem Informasi Keuangan dan Transparansi/ Dashboard APBDes	Transparansi Akuntabilitas, Efektivitas & Efisiensi, dan Visi Strategis	Informasi anggaran desa secara terbuka melalui website pleret.id, memperkuat pengawasan publik serta meningkatkan pengelolaan dan pengendalian keuangan desa..
Sistem Administrasi Digital dengan Tanda Tangan Elektronik	Transparansi, Akuntabilitas, Supremasi Hukum, Efektivitas & Efisiensi, dan Visi Strategis	Mempercepat proses administrasi dokumen secara legal dan aman, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan serta menjaga legitimasi hukum.
Sistem Diseminasi Informasi Publik Berbasis Media Sosial Multikanal	Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Efektivitas & Efisiensi, dan Visi Strategis	Penyebaran informasi cepat, promosi potensi, wisata & UMKM, ruang diskusi publik interaktif.
Sistem Arsip Digital dan Manajemen Dokumen Terintegrasi (dokumen.pleret.id)	Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas & Efisiensi, dan Visi Strategis	Pengelolaan arsip digital terdokumentasi dengan baik, efisiensi administrasi serta memperkuat akuntabilitas kelembagaan.

Sumber: Hasil olah data wawancara, observasi sistem, dan analisis dokumen kebijakan Pemerintah

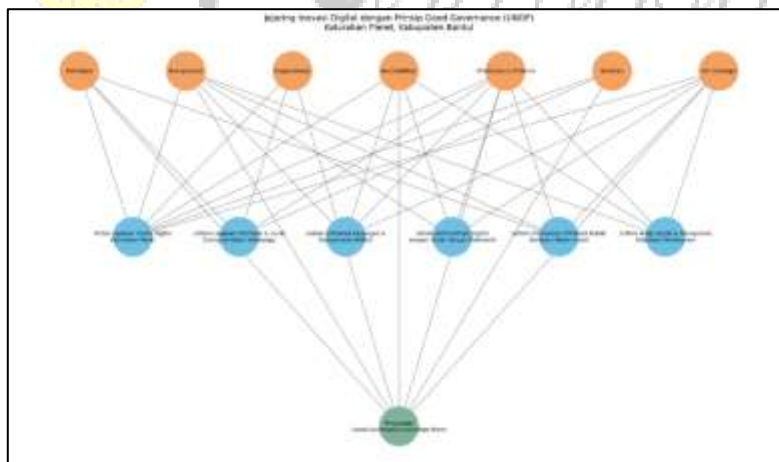
Kalurahan Bantul

Berdasarkan Tabel 2. Inovasi pemerintahan digital di Kalurahan Pleret tidak berkontribusi secara singular terhadap satu prinsip tata kelola, melainkan memiliki keterkaitan yang bersifat multidimensional. Temuan ini sejalan dengan penelitian Restianti & Subaidi (2024) yang menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik memperkuat legitimasi birokrasi desa, didukung studi Abidin (2021) yang menekankan digitalisasi sebagai strategi reformasi birokrasi dapat meningkatkan kepercayaan publik. Inovasi portal layanan publik digital berperan signifikan dalam memperkuat partisipasi masyarakat melalui penyediaan akses layanan elektronik, meningkatkan transparansi informasi pelayanan, serta mendorong efektivitas dan efisiensi proses administratif. Diperkuat temuan mengenai otomatisasi proses administrative yang berbelit-belit dan peningkatan kualitas layanan (van Kersbergen & Vis, 2022). Inovasi ini memfasilitasi masyarakat untuk mengakses layanan tanpa keharusan untuk melakukan kunjungan fisik ke kantor desa, sehingga mereduksi hambatan administratif dan biaya transaksi yang ditanggung masyarakat.

Sementara itu, sistem layanan surat daring berbasis WhatsApp menunjukkan kontribusi substansial terhadap prinsip responsivitas dan inklusivitas. Pemanfaatan platform komunikasi yang telah familiar dan terinternalisasi dalam keseharian masyarakat desa memfasilitasi penyampaian informasi, mengakselerasi respons pemerintah desa, serta menjangkau segmen masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap layanan konvensional. Hal ini mencerminkan pendekatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan pengguna (user-centric service delivery). Kontribusi terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas terlihat dari implementasi sistem informasi keuangan dan transparansi APBKal serta pengelolaan arsip digital.

Sebagaimana disampaikan aparat desa dalam wawancara lapangan “Melalui menu regulasi dan APBKal, masyarakat bisa melihat dokumen resmi dan alokasi anggaran secara terbuka. Jadi tidak ada lagi informasi yang ditutup-tutupi.” Temuan ini sejalan dengan temuan sebelumnya transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan publik, karena dapat mengurangi potensi korupsi dan menumbuhkan budaya keterbukaan (Andhika, 2018). Melalui sistem ini, informasi keuangan desa dapat diakses secara terbuka oleh publik, sementara dokumentasi administratif tersimpan secara sistematis dan dapat ditelusuri dengan mudah. Kondisi tersebut memperkuat mekanisme pengawasan publik dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah desa.

Sistem administrasi digital dengan tanda tangan elektronik berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Digitalisasi proses administratif mengakselerasi penyelesaian dokumen dan mereduksi dependensi pada prosedur manual yang berpotensi menimbulkan keterlambatan layanan. Inovasi ini juga mendukung prinsip visi strategis, karena menunjukkan orientasi kebijakan pemerintah desa dalam membangun tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, penerapan inovasi *digital government* meningkatkan pengelolaan data dan pengambilan keputusan (Bhatt, 2020). Pemerintah dapat memanfaatkan informasi untuk mengambil kebijakan dan mengidentifikasi daerah yang perlu ditingkatkan melalui manajemen data dan sistem informasi manajemen dalam inovasi pemerintahan digital. Pemanfaatan sistem diseminasi informasi publik berbasis media sosial multikanal Kalurahan Pleret menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi pemerintahan desa, tetapi juga berkembang menjadi instrumen strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa “media sosial tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi pemerintahan, tetapi juga untuk mempromosikan potensi desa, termasuk sektor pariwisata, budaya, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).” Pemanfaatan ini memperluas jangkauan informasi publik, meningkatkan interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal melalui peningkatan visibilitas produk dan kegiatan masyarakat.



Gambar 5. Keterkaitan Inovasi *Digital government* di Kalurahan Pleret Terhadap Penguatan Prinsip *Good Governance* (Hasil olah data wawancara, observasi sistem, dan analisis dokumen kebijakan Pemerintah Kalurahan Bantul)



Berdasarkan gambar 5. Merupakan visualisasi jejaring inovasi yang ada di Kalurahan Pleret dengan prinsip prinsip *good governance* menurut kajian dari *UNDP*. Merujuk pada tabel kontribusi inovasi digital Kalurahan Pleret terhadap prinsip *good governance*. Representasi visual jejaring menggambarkan bahwa inovasi digital yang dioperasionalisasikan tidak memberikan kontribusi secara singular atau terpisah terhadap satu prinsip tata kelola semata, melainkan membentuk keterkaitan yang bersifat multidimensional dan saling memperkuat. Konfigurasi jejaring memvalidasi temuan terdahulu bahwa masing-masing inovasi digital memiliki kontribusi terhadap sejumlah prinsip *good governance* secara konkuren. Portal Layanan Publik Digital Kalurahan Pleret, menunjukkan tingkat konektivitas tertinggi dengan berelasi pada hampir keseluruhan prinsip *good governance* (partisipasi, transparansi, responsivitas, akuntabilitas, efektivitas & efisiensi, serta visi strategis). Hal ini menunjukkan portal digital merupakan inovasi dengan cakupan paling luas dalam ekosistem tata kelola digital desa, selaras dengan hasil tabel yang menunjukkan kontribusi portal terhadap enam dari sembilan prinsip *good governance*.

Sistem Layanan Informasi & Surat Daring Berbasis WhatsApp menunjukkan keterkaitan kuat dengan prinsip responsivitas, keadilan, efektivitas & efisiensi, serta partisipasi. Pola ini memperkuat temuan bahwa inovasi yang memanfaatkan platform komunikasi yang telah familiar di masyarakat mampu meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik, terutama bagi segmen masyarakat dengan keterbatasan akses terhadap teknologi berbasis web. Sementara itu, Sistem Informasi Keuangan & Transparansi APBKal menunjukkan kontribusi dominan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun juga berkorelasi dengan prinsip partisipasi dan efektivitas & efisiensi, mengonfirmasi bahwa keterbukaan informasi keuangan tidak hanya memperkuat akuntabilitas tetapi juga memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Analisis jejaring juga mengungkapkan bahwa setiap prinsip *good governance* diperkuat oleh beberapa inovasi digital secara bersamaan. Prinsip efektivitas & efisiensi memperoleh dukungan dari keseluruhan enam inovasi digital, mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas dan efisiensi merupakan dampak fundamental dan universal dari transformasi digital di Kalurahan Pleret. Prinsip transparansi dan akuntabilitas mendapat dukungan dari lima inovasi, mencerminkan komitmen substantif terhadap keterbukaan dan pertanggungjawaban sebagaimana direkomendasikan dalam kerangka *good governance UNDP* (1997) dan pendekatan *open government OECD* (2014).

Representasi visual jejaring mengonfirmasi inovasi digital di Kalurahan Pleret dirancang sebagai instrumen tata kelola yang saling melengkapi dan terintegrasi. Keseluruhan inovasi saling berelasi melalui prinsip-prinsip *good governance* yang identik, membentuk ekosistem yang kohesif di mana setiap elemen baik inovasi maupun prinsip untuk penguatan *good governance* Kalurahan Pleret. Pola koneksi yang intensif dan simetris menunjukkan bahwa implementasi *digital government* di Kalurahan Pleret telah diorientasikan untuk mendukung reformasi tata kelola pemerintahan desa secara menyeluruh, bukan sekadar adopsi teknologi yang fragmentaris. Temuan ini memperkuat proposisi bahwa keberhasilan transformasi digital di tingkat desa memerlukan pendekatan yang membangun ekosistem inovasi standar *good governance* internasional ke dalam praktik administrasi yang konkret dan berkelanjutan

D. Kendala dan Tantangan

Meskipun inovasi pemerintahan digital di Kalurahan Pleret menunjukkan kontribusi terhadap penguatan prinsip-prinsip *good governance*, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan struktural. Salah satu tantangan fundamental adalah keterbatasan literasi digital, baik di kalangan aparatur desa maupun masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Sujai et al (2022).



Keterbatasan literasi digital aparaturnya desa berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Aparatur desa belum sepenuhnya memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk mengoperasikan sistem digital secara optimal, sehingga potensi inovasi digital belum dapat dimaksimalkan. Akibatnya, praktik-praktik administrasi konvensional masih berlangsung berdampingan dengan sistem digital, yang pada akhirnya mereduksi efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Lebih lanjut, tantangan implementasi pemerintahan digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural dan organisatoris. Penerapan pemerintahan digital menuntut transformasi cara berpikir dan cara bekerja aparaturnya desa menuju pola kerja yang lebih terbuka, adaptif, dan berbasis data. Apabila aparaturnya desa masih mempertahankan pola kerja tradisional, resistensi terhadap perubahan menjadi salah satu hambatan utama dalam proses transformasi digital. Oleh karena itu, keberhasilan inovasi pemerintahan digital di tingkat desa memerlukan upaya perubahan budaya organisasi yang selaras dengan pengembangan teknologi, sehingga transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa. Studi ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penerapan inovasi digital, khususnya terkait kesenjangan kecakapan digital. Pengguna layanan menyatakan bahwa “Pengurusan secara langsung masih dirasa lebih mudah dibandingkan layanan daring karena belum terbiasa mengisi data secara online.” Hasil wawancara menunjukkan warga masih memilih berkunjung langsung ke kantor desa karena belum terbiasa dengan layanan online atau mengalami kesulitan dalam mengisi data melalui platform daring. Situasi ini menegaskan keberhasilan pemerintahan digital di desa memerlukan dukungan terus-menerus, seperti peningkatan kecakapan digital dan bimbingan bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap pengecualian teknologi.

SIMPULAN

Inovasi *digital government* yang dioperasionalkan di Kalurahan Pleret, Kabupaten Bantul, telah memberikan kontribusi terhadap penguatan prinsip-prinsip *good governance*. Implementasi Portal Layanan Publik Digital Kalurahan Pleret (pleret.id), Sistem Layanan Informasi dan Surat Daring berbasis WhatsApp Gateway, Sistem Informasi Keuangan dan Transparansi APBKal, Sistem Administrasi Digital dengan Tanda Tangan Elektronik, Sistem Diseminasi Informasi Publik berbasis media sosial multikanal, serta Sistem Arsip Digital dan Manajemen Dokumen Terintegrasi (dokumen.pleret.id) menunjukkan bahwa digitalisasi desa telah diorientasikan sebagai strategi tata kelola pemerintahan, bukan sekadar modernisasi teknis pelayanan publik. Secara substantif, inovasi-inovasi tersebut memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui keterbukaan informasi keuangan dan dokumentasi administrasi, meningkatkan partisipasi dan responsivitas melalui kanal layanan dan komunikasi digital yang aksesibel, serta mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa. Integrasi layanan digital juga mencerminkan visi strategis pemerintah desa dalam membangun tata kelola yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Namun demikian, kajian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi, meliputi kesenjangan literasi digital aparaturnya dan masyarakat, keterbatasan infrastruktur jaringan internet, distribusi beban kerja aparaturnya yang belum optimal, serta ketergantungan pada anggaran tahunan untuk menjaga keberlanjutan sistem digital. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan *digital government* di tingkat desa sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, dan budaya organisasi pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilia, U. A., Muharam, R. S., & Nurlia, D. E. (2024). *Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Mewujudkan Society 5.0 yang Inklusif*.
- Agung Gede Oka Wisnumurti, A., Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi, I., & Sumawidayani, N. (2025). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA ADAT (SIKUAT) DALAM MEWUJUDKAN GOOD LOCAL GOVERNANCE DI BALI. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(2).
- Ahrend, R., & al., et. (2014). What Makes Cities More Productive? Evidence on the Role of Urban Governance from Five OECD Countries. In *OECD Regional Development Working Papers: Vol. 2014/05*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5jz432cf2d8p-en>
- Almarabeh, T., & Abuali, A. (2010). A General Framework for E-Government: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success. In *European Journal of Scientific Research* (Vol. 39, Issue 1). <http://www.eurojournals.com/ejsr.htm>
- Andhika, L. R. (2018). Elemen dan Faktor Governansi Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 6(03), 207–222. <https://doi.org/10.35450/jip.v6i03.112>
- Ben, E. R., & Schuppan, T. (2014). E-government innovations and work transformations: Implications of the introduction of electronic tools in public government organizations. *International Journal of Electronic Government Research*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.4018/ijegr.2014010101>
- Bhatt, S. (2020). Digitalization of Rural India: Digital Village. *VISION: Journal of Indian Taxation*, 7(1), 83. <https://doi.org/10.17492/vision.v7i1.195413>
- Chhikara, B. S. (2015). INTEGRATED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Good Governance: Role of science, technology and Innovations. In *J. Soc Sci* (Vol. 2, Issue 1). <http://pubs.iscience.in/ijss>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=Rkh4EAAAQBAJ>
- Djakit Prihartono. (2023). PENERAPAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNANCE PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(2).
- Dwi Maudina, S., Rachmawati, I., & Purwanti, D. (2024). PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PROGRAM SIMPELIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF E-GOVERNMENT DI KABUPATEN SUKABUMI. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1).
- Elahi, K. Q. I. (2009). UNDP on good governance. *International Journal of Social Economics*, 36(12), 1167–1180. <https://doi.org/10.1108/03068290910996981>
- Erkut, B. (2020). From digital government to digital governance: Are we there yet? *Sustainability (Switzerland)*, 12(3). <https://doi.org/10.3390/su12030860>
- Guenduez, A. A., Demircioglu, M. A., Mueller, E. M., & Cinar, E. (2025). Digital innovation strategies in the public sector. *Research Policy*, 54(8). <https://doi.org/10.1016/j.respol.2025.105274>
- Gusman, S. W. (2024). *Development of the Indonesian Government's Digital Transformation*. 5(5). <https://doi.org/10.38035/dijemss.v5i5>
- Hajar, S., & Arma, N. A. (2024). Co-creating public value into digital-based public service innovation in the village governance. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(3), 516–538. <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.15891>
- Juiz, C., Guerrero, C., & Lera, I. (2014). Implementing Good Governance Principles for the Public Sector in Information Technology Governance Frameworks. *Open Journal of Accounting*, 03(01), 9–27. <https://doi.org/10.4236/ojacct.2014.31003>
- Kalurahan Pleret. (2024). *RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKal) KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET TAHUN 2025*.

- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. (2024, 30 November). Kemendes PDT targetkan seluruh desa di Indonesia jadi desa digital pada 2025. *Tribratanews Polri*. Diakses dari <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kemendes-pdt-targetkan-seluruh-desa-di-indonesia-jadi-desa-digital-pada-2025-81429>
- Keping, Y. (2018). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4>
- Lailiyah, K. (2022). Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 2, 26–34.
- Mao, Z., & Zhu, Y. (2025). Does e-government integration contribute to the quality and equality of local public services? Empirical evidence from China. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04539-y>
- Mayyora, R., Sholihah, Q., Wanusmawatie, I., & Haris Wanto, A. (2025). DIGITAL TRANSFORMATION OF VILLAGES AND ITS IMPLICATIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: LITERATURE REVIEW APPROACH. *Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)*, 5(2), 100–111.
- Mergel, I., Ganapati, S., & Whitford, A. B. (2021). Agile: A New Way of Governing. *Public Administration Review*, 81(1), 161–165. <https://doi.org/10.1111/puar.13202>
- OECD. (2020). “The public sector innovation lifecycle: A device to assist teams and organisations in developing a more sophisticated approach to public sector innovation”, *OECD Working Papers on Public Governance* (OECD Working Papers on Public Governance, Vol. 37). <https://doi.org/10.1787/0d1bf7e7-en>
- Prayitno, A. (2023). Technological Innovation in Public Administration Transformation: Case Study of e-Government Implementation in Indonesia. *Journal of Governance*, 8(4). <https://doi.org/10.31506/jog.v8i4.23017>
- Restianti, A., & Subaidi, &. (2024). INSTITUSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGELOLAAN DALAM MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE. *JKP) Journal of Government, Social and Politics*, 10.
- Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Sanur Kaja, D., Denpasar Selatan, K., Denpasar Gusti Agung Ayu Yulartika Dewi, K. I., & Nyoman Mangku Suryana, I. (2024). KOLABORASI TRIPLE HELIX DALAM PROGRAM INOVASI DESA(Studi Kasus: Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan,Kota Denpasar). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2).
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2017). Metagoverning Collaborative Innovation in Governance Networks. *American Review of Public Administration*, 47(7), 826–839. <https://doi.org/10.1177/0275074016643181>
- Sujai, I., Nursetiawan, I., Yuliani, D., & Studi Ilmu Pemerintahan, P. (2022). *ANALISIS BUDAYA LITERASI DIGITAL PEMERINTAH DESA SADANANYA KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS*.
- Suprianto, B. (2023). *Literature Review: Penerapan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik*. 8(2), 123–128.
- Suwarjo, S. (2025). Smart Village: An Effort to Implement District Digitalization to Support Public Services in Pleret Kapanewon Pleret District Bantul District. *POPULIKA*, 13(1), 14–21. <https://doi.org/10.37631/populika.v13i1.1661>

- Transformasi Digitas: Mewujudkan E-Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat. (2025, 9 April). Masterplan Desa. Diakses dari <https://www.masterplandes.com/desa-digital/transformasi-digital-mewujudkan-e-desa-untuk-kesejahteraan-masyarakat>
- United Nations. (2016). *Leaving no one behind: the imperative of inclusive development Report on the World Social Situation 2016*.
- United Nations. (2024). *United Nations E-Government Survey 2024: Regional E-Government Development and the Performance of Country Groupings*.
- van Kersbergen, K., & Vis, B. (2022). Digitalization as a policy response to social acceleration: Comparing democratic problem solving in Denmark and the Netherlands. *Government Information Quarterly*, 39(3). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101707>
- Wibawa, I. G. A., & Antarini, L. (2020). Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Digital Local Government). *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 57–71. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration>
- Wijaya, A., & Saleh, M. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(3).
- Zamroni, M., & Junior, A. (2024). *REFORMASI BIROKRASI MELALUI DIGITALISASI DI DESA PLERET* (Vol. 7, Issue 1).
- Zou, Q., Mao, Z., Yan, R., Liu, S., & Duan, Z. (2023). Vision and reality of e-government for governance improvement: Evidence from global cross-country panel data. *Technological Forecasting and Social Change*, 194. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122667>

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Pemerintah Kalurahan Pleret. (2024). Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2025. Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2024 Nomor 03.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 yang mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2023 yang berfokus pada pengembangan aplikasi SPBE.
- Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengembangan E-Government